LAPORAN HASIL RAPAT KERJA PRESIDEN RI DENGAN PARA MENTERI DAN GUBERNUR SE-INDONESIA

Oleh:
Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat
Istana Tampak Siring, 21 April 2010

TUJUAN RAKER

1. **Menyempurnakan** kebijakan agar tepat sasaran;
2. **Memperbaharui** kebijakan agar tepat sasaran;
3. **Memastikan** kebijakan agar tepat sasaran.

AGENDA RAKER

- Raker Dihadiri oleh Presiden, Wakil Presiden, Para Menteri KIB-II, Para Anggota Wantimpres, Para Gubernur se-Indonesia, Para Ketua DPRD Provinsi, Para Pimpinan LPNK, Para Pimpinan BUMN, Para Pimpinan Asosiasi, Para Ekonom, Para Teknolog dan Para Pimpinan Media Massa.
- Raker diawali dengan Pengarahan Presiden pada Sidang Pleno,
- Menko Perekonomian dan Menko Kesra menyampaikan Pemaparan dihadapan Sidang Pleno.
- Raker dilanjutkan dalam Sidang Kelompok, yang terdiri:

1. Kelompok I : Pembangunan ekonomi dan dunia usaha dipimpin oleh Menkeu dan Kepala BKPM
2. Kelompok II : Program Pro-Rakyat dipimpin oleh Mendiknas
3. Kelompok III: Program Keadilan Untuk Semua, dipimpin oleh Mensos
4. Kelompok IV: Program Pencapaian MDGs dipimpin oleh Men. PPN / Ka Bappenas

ARAHAN PRESIDEN BERKAITAN DENGAN PEMBANGUNAN YANG BERKEADILAN:

1. Prosentase **kemiskinan** harus diturunkan;
2. Prosentase **pengangguran** harus diturunkan;
3. Kebijakan yang ada **harus disempurnakan** agar sasaran dapat dicapai;
4. **Sinergitas** Antara Pusat dan Daerah;
5. **Penanganan di sisi Hulu,** melalui: Perbaikan Kondisi Sosial dan ekonomi secara nyata;
6. **Penanganan di sisi Pencegahan** melalui, antara lain: pemerataan pendidikan, penyuluhan dan Revitalisasi Program Keluarga Berencana;
7. **Penanganan di sisi Hilir,** melalui: Penanganan Program Pro-Rakyat, Pengembangan UMKM, Program-Program Hibah bersama Dunia Usaha.

SIDANG-SIDANG KELOMPOK BERLANGSUNG SELAMA 1.5 HARI DENGAN SASARAN:

1. **Menyamakan Persepsi** mengenai identifikasi tantangan dan langkah-langkah perbaikan pelaksanaan program;
2. **Memperkuat sinergi** pusat, daerah dan antar sektor dalam rangka perbaikan pelaksanaan Program;
3. **Mendapatkan masukan** mengenai upaya perbaikan Program;
4. **Mempersiapkan matriks** lampiran INPRES tentang pelaksanaan Program.

SUASANA SIDANG-SIDANG KELOMPOK

1. Para peserta merasa pertemuan di Tampak Siring ini **sangat bermanfaat**, dapat **mengeliminasi dikotomi** Pusat dan Daerah, serta keinginan untuk lebih memperhatikan daerah-daerah terluar, terdepan, terpencil dan tertinggal;
2. **Suasana sidang kelompok** berlangsung serius, santai dan sangat interaktif. Semua peserta aktif bertanya dan mengemukakan pendapat;
3. Suasana sidang mampu **mengeliminasi sekat-sekat birokrasi**, contoh: Ketua DPRD meminta perhatian pemerintah pusat berkaitan dengan pengelolaan wilayah perbatasan, seorang Gubernur minta Panglima TNI untuk membentuk Korem di wilayahnya dan minta Kapolri untuk membentuk Polda di daerahnya, dll;
4. Ketua DPRD Prov Bali **baru pertama kali** mengikuti Retreat dan ternyata **baru jelas betul tentang** program PNPM, MDGs dan program Pro Rakyat lainnya;
5. Wakil Presiden hadir pada sidang-sidang kelompok,
6. Peserta sidang kelompok **"surprise"** atas kunjungan **"pendadakan"** Bapak Presiden yang langsung dapat memberikan pencerahan masalah yang sedang dibahas.

SIDANG-SIDANG KELOMPOK BERHASIL MENYUSUN PROGRAM DAN TINDAKAN UNTUK DILAKSANAKAN, SBB:

Pokja II: **Evaluasi Program Pro Rakyat,** menghasilkan **6 program** dan **30 tindakan.**

Program-Program Pro Rakyat yang akan dilaksanakan adalah:

1. **Penyempurnaan** pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH);
2. **Peningkatan** kontribusi PEMDA terhadap PNPM Mandiri;
3. **Integrasi** PNPM Mandiri dengan perencanaan desa/kelurahan;
4. **Integrasi** PNPM Mandiri dengan fasilitas pembiayaan;
5. **Perluasan** penyaluran kredit;
6. **Penguatan** kelembagaan keuangan mikro bukan Bank dan bukan Koperasi.

Contoh Matriks tentang Rencana Tindak Percepatan Pencapaian Program Pro Rakyat

PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN	TARGET PENYELESAIAN		SASARAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PEMERINTAH DAERAH	KET
			2010	2011				
Klaster 1 : Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Keluarga								
Penyempurnaan pelaksanaan PKH	**C. Memperbaiki Kordinasi Antar Kementerian dan Pemerintah Daerah** 1. Menyusun mekanisme verifikasi untuk anak jalanan dan pekerja anak yang sedang dipersiapkan untuk kembali ke satuan pendidikan.	Tersusunnya mekanisme agar anak jalanan dan pekerja anak siap kembali ke satuan pendidikan.	**100%**		Pelaksanaan PKH sepenuhnya sebagai program pemberian uang tunai bersyarat	Kemensos (Koordinator), Kemenakertrans Kemendiknas, Kemenag, dan Bappenas.	Gubernur (Koordinator),Bupati/ Walikota	Persiapan dapat dilakukan di panti, rumah singgah, atau rumah penampungan lainnya.
	2. Menyiapkan rumah singgah bagi anak jalanan dan pekerja anak di lokasi terdekat, dimana PKH dilaksanakan.	Tersedianya rumah singgah di lokasi terdekat, dimana PKH dilaksanakan.	**50%**	**100%**		Kemensos (Koordinator) dan Kemenakertrans	Gubernur (Koordinator), Bupati/Walikota	
	3. Menyusun mekanisme untuk memastikan agar anak dari keluarga peserta PKH dapat diterima kembali di satuan pendidikan.	Memastikan anak dari keluarga peserta PKH dapat kembali ke satuan pendidikan.	**100%**			Kemensos (Koordinator), Kemendiknas, Kemenag, dan Bappenas.	Gubernur (Koordinator), Bupati/Walikota	

Lanjutan . . .

Klaster 2 : Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat								
Integrasi PNPM Mandiri dengan fasilitas pembiayaan	Menyusun mekanisme agar usulan pemberdayaan ekonomi lokal berbasis masyarakat dapat memperoleh pembiayaan, misalnya: KUR atau CSR.	Tersusunnya mekanisme agar usulan pemberdayaan ekonomi lokal yang disusun berdasarkan mekanisme PNPM dapat memperoleh akses pembiayaan	**100%**		Terlaksana nya Integrasi PNPM Mandiri ditingkat desa/kelurahan	**Kemenko Kesra** (Koordinator) Dibantu oleh Kementerian/ Lembaga terkait: -Kemendagri -Kemen PU -Kemen PDT -Kementan -Kemenbudpar -Kemen KP -Kemenpera -Bappenas	Gubernur (Koordinator) , Bupati/Walikota Dinas terkait di Provinsi : -Dinas PU -Dinas Pertanian -Dinas Pariwisata -Dinas Perikanan -Bappeda -BPM/PMD	
Klaster 3 : Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil								
Penguatan Kelembagaan Keuangan Mikro bukan bank dan bukan koperasi	Melakukan Inventarisasi Lembaga Keuangan Mikro (LKM) bukan bank dan bukan koperasi.	Tersusunnya basis data LKM bukan bank dan bukan koperasi.	Jatim, Jabar, Jateng , DIY, Banten, Bali	Seluruh provinsi	Beroperasi LKM dengan landasan hukum yang jelas.	Kementerian Dalam Negeri	Gubernur (Koordinator) , Bupati/ Walikota	Didukung oleh K/L terkait lainnya. Sasarannya : LKM bukan bank dan bukan koperasi, baik yang berbadan hukum maupun belum berbadan hukum

<u>Pokja III</u>: **Keadilan Untuk Semua,** menghasilkan **21 Program,** dan **43 tindakan**

Program-Program Keadilan Untuk Semua yang akan dilaksanakan adalah:

1. Program Kesejahteraan Sosial Anak Balita (PKSAB);
2. Program Kesejahteraan Sosial Anak Terlantar (PKSANTAR);
3. Program Pembinaan kesehatan bagi anak terlantar;
4. Program Kesejahteraan Sosial Anak Jalanan (PKS-Anjal);
5. Program Pendidikan Terpadu Anak Harapan;
6. Program Kesejahteraan Sosial Anak Berhadapan dengan Hukum (PKS-ABH);
7. Program Perlindungan dan Kesehatan Kesejahteraan Sosial Anak berhadapan dengan Hukum;
8. Program Peningkatan kapasitas Aparat Penegak Hukum yang ramah anak;
9. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Peradilan yang ramah Anak;

Pokja III - Lanjutan

10. Program Rehabilitasi & Perlindungan Sosial bagi Penyandang cacat;
11. Program Rehabilitasi & Perlindungan Sosial bagi Penyandang Cacat anggota Prajurit TNI/POLRI;
12. Program Kesejahteraan Sosial Anak Dengan Kecacatan (PKS-ADK);
13. Program Pelayanan Kesehatan Anak Dengan Kecacatan;
14. Program Rehabilitasi & Perlindungan Sosial Bagi Lanjut Usia;
15. Program Rehabilitasi & Perlindungan Sosial Korban NAPZA;
16. Program Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran gelap Narkoba;
17. Program Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT);
18. Program Kesejahteraan Sosial Anak yang membutuhkan perlindungan khusus;
19. Program Perlindungan Sosial Pekerja Migran Telantar;
20. Program Peningkatan Fasilitasi Penempatan & Perlindungan TKI;
21. Program Peningkatan Akses Hukum Perempuan Miskin & Kelompok Marginal.

CONTOH MATRIKS LAMPIRAN INPRES KEADILAN UNTUK SEMUA *(JUSTICE FOR ALL)*

PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN	TARGET PENYELESAIAN		SASARAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PEMERINTAH DAERAH	KETERANGAN
			2010	2011				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Program Kesejahteraan Sosial Anak Balita (PKS AB)	Penyempurnaan sistem pendataan dan targeting	Tersedianya sistem pendataan dan targeting	**50%**	**100%**	Meningkatnya pemenuhan hak kebutuhan dasar anak dalam asuhan keluarga	Kementerian Sosial (koordinator) Kementerian Kesehatan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Gubernur, Bupati, Walikota	Kebutuhan dasar meliputi sandang, pangan, papan, air berish, kesehatan, pendidikan, rekreasi, akte kelahiran dan sosial
	Seleksi dan sertifikasi pekerja sosial	Tersedianya seleksi dan sertifikasi pekerja sosial	**20 orang**	**100 orang**				
	Penyaluran tabungan kesejahteraan sosial anak balita	Tersalurkannya tabungan kesejahteraan sosial anak balita	**1.405 orang**	**6.925 orang**				
Program Kesejahteraan Sosial Anak telantar (PKS Antar)	Penyempurnaan sistem database panti sosial asuhan anak	Tersedianya sistem database panti sosial asuhan anak	**3.500 panti**	**5.000 panti**	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar, aksesibilitas, pelayanan sosial dasar dalam asuhan keluarga dan/atau melalui panti sosial	Kementerian Sosial	Gubernur, Bupati, Walikota	Bantuan sosial disalurkan melalui keluarga dan/ atau panti sosial asuhan anak, termasuk anak-anak anggota POLRI/TNI korban konflik yang telantar
	Penyaluran bantuan kebutuhan dasar untuk keluarga dan/atau melalui panti sosial	Tersalurkannya bantuan kebutuhan dasar	**136.706 orang**	**142.530 orang**				

Lanjutan . . .

PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN	TARGET PENYELESAIAN		SASARAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PEMERINTAH DAERAH	KETERANGAN
			2010	2011				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Program Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial bagi Penyandang Cacat	Penataan sistem verifikasi data calon penerima bantuan, sosialisasi dan koordinasi keterpaduan program	Keterdiaan data penerima bantuan	**100%**	**100%**	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar bagi penyandang cacat berat dan penyandang cacat dalam lembaga/panti	Kementerian Sosial	Gubernur, Bupati/ Walikota	
	Peningkatan bantuan jaminan sosial Penca berat di dalam keluarga.	Jumlah penyandang cacat berat yang menerima bantuan jaminan sosial.	**17.000 orang**	**19.500 orang**				
	Bantuan tambahan kebutuhan dasar penyandang cacat dalam panti atau melalui lembaga	Jumlah penyandang cacat dalam lembaga / panti yang mendapat bantuan pemenuhan kebutuhan dasar	**11.000 orang**	**13.500 orang**				

<u>Pokja IV:</u> **Pencapaian MDGs** menghasilkan **19 Program,** dan **32 tindakan**

Program-Program Pencapaian MDGs yang akan dilaksanakan adalah:

1. Perbaikan Gizi Masyarakat;
2. Peningkatan Akses Pendidikan SD/MI;
3. Peningkatan Keberaksaraan Penduduk;
4. Mencapai Pendidikan untuk Semua;
5. Mendorong Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan;
6. Penurunan Angka Kematian Anak;
7. Penurunan Angka Kematian Ibu;
8. Kependudukan dan Keluarga Berencana;
9. Pengendalian Penyakit HIV/AIDS, Malaria, dan TB;
10. Pengelolaan Sumber Daya Air;

Pokja IV Lanjutan....

11. Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman;
12. Peningkatan Akses Penduduk Terhadap Sanitasi Dasar Yang Layak;
13. Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Perlindungan Hutan;
14. Peningkatan Fungsi dan Daya Dukung DAS Berbasis Pemberdayaan Masyarakat;
15. Perencanaan Makro Bidang Kehutanan dan Pemantapan Kawasan Hutan;
16. Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
17. Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
18. Pengelolaan Listrik dan Pemanfaatan Energi;
19. Pendukung Percepatan Pencapaian MDGs.

CONTOH MATRIKS LAMPIRAN INPRES RENCANA TINDAK UPAYA PERCEPATAN PENCAPAIAN MDGs

Goal 5. Meningkatkan Kesehatan Ibu

PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN	TARGET PENYELESAIAN		SASARAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PEMERINTAH DAERAH	KETERANGAN
			2010	2011				
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)
Penurunan Kematian Ibu	1.Peningkatan pelayanan kesehatan ibu	1. Persentase puskesmas rawat inap yang mampu Pelayanan Obstetrik Neonatal Emergensi Dasar (PONED)	**60**	**70**	Menurunnya angka kematian ibu	Kementerian Kesehatan (Koordinator), Kemendagri	Diprioritaskan pada provinsi-provinsi dengan angka pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan terlatih di bawah angka rata-rata nasional (< 77,37%) yaitu provinsi: Maluku, Malut, Sulbar, Sultra, Papua, NTT, Kalbar, Papua Barat, Sulteng, Gorontalo, Kalteng, Sulsel, Jabar, Sumsel, NTB, Kalsel, Lampung.	Sumber data: Susenas, 2009
		2. Persentase RS kab/kota yang melaksanakan Pelayanan Obstetrik Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK)	**80**	**85**		Kementerian Kesehatan (Koordinator), Kemendagri		

CONTOH MATRIKS LAMPIRAN INPRES RENCANA TINDAK UPAYA PERCEPATAN PENCAPAIAN MDGs

Goal 6. Mengendalikan HIV dan AIDS, Malaria dan Penyakit Menular Lainnya (TB)

PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN	TARGET PENYELESAIAN		SASARAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PEMERINTAH DAERAH	KETERANGAN
			2010	2011				
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)
Pengendalian Penyakit HIV dan AIDS, Malaria, dan TB	1.Pengendalian Penyakit HIV dan AIDS	1. Jumlah orang yang berumur 15 tahun atau lebih yang menerima konseling dan testing HIV	**300.000**	**400.000**	Terkendali-nya penyakit HIV dan AIDS, Malaria dan TB	Kementerian Kesehatan (Koordinator), KPAN	Seluruh Pemerintah Daerah Provinsi dan Kab/Kota, serta KPAD di Indonesia, diprioritaskan pada berbagai Provinsi dengan angka kasus HIV dan AIDS tertinggi, meliputi: Papua, DKI Jakarta, Jabar, Jatim, Bali, Sumut, Kalbar, Jateng, Riau, Sumsel.	Sumber data: Kementerian Kesehatan, 2008
		2. Persentase Orang dengan HIV dan AIDS (ODHA) yang mendapatkan *Anti Retroviral Treatment* (ART)	**70**	**75**				

RUMUSAN RANCANGAN INPRES:

1. 46 Program dan 112 Tindakan kemudian dirumuskan dalam Rancangan INPRES, yang diusulkan kepada Bapak Presiden RI;
2. Termasuk dalam Rancangan INPRES adalah Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi Program K/L di Pusat serta Program di Provinsi;
3. Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi dilaksanakan oleh Kementerian Koordinator, UKP4, BAPPENAS dan Kementerian Keuangan.

SUBSTANSI RANCANGAN INPRES:

1. Untuk lebih **Memfokuskan** Pelaksanaan Pembangunan Yang Berkeadilan dan Berkesinambungan, Penajaman Prioritas Pembangunan Nasional, sebagaimana termuat dalam **INPRES No. 1/Th. 2010**, maka diusulkan **INPRES tentang Program Pembangunan Yang Berkeadilan.**
2. **Pelaksanaan Program Pembangunan Yang Berkeadilan Meliputi:**
   a. Program Pro Rakyat
   b. Keadilan Untuk Semua
   c. Pencapaian MDGs
3. **Untuk Program Pro Rakyat Difokuskan Pada:**
   a. Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Keluarga
   b. Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Masyarakat
   c. Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Usaha Mikro dan Usaha Kecil
4. **Untuk Pembangunan Keadilan Untuk Semua, Difokuskan Pada :**
   a. Kesejahteraan Sosial Anak Balita Telantar
   b. Kesejahteraan Sosial Anak Telantar
   c. Kesejahteraan Sosial Anak Jalanan
   d. Perlindungan Anak Berhadapan Dengan Hukum
   e. Rehabilitasi Dan Perlindungan Sosial Bagi Lanjut Usia Telantar
   f. Rehabilitasi Dan Perlindungan Sosial Bagi Penyandang Cacat
   g. Rehablitasi Dan Perlindungan Sosial Bagi Korban Narkotika, Pskitoprika Dan Zat Adiktif Lainnya/NAPZA
   h. Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil
   i. Perlindungan Sosial Pekerja Migran Telantar

5.Untuk program pencapaian MDGs difokuskan pada:

a. Pemberantasan kemiskinan dan kelaparan
b. Pencapaian pendidikan dasar untuk semua
c. Pencapaian kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan
d. Penurunan angka kematian anak
e. Kesehatan Ibu
f. Pengendalian HIV/AIDS, malaria dan penyakit menular lainnya
g. Penjaminan kelestarian hidup

Pelaksanaan Program **Pembangunan Yang Berkeadilan** berpedoman pada RPJMN tahun 2010-2014, dan **merujuk** pada hasil **Rapat Kerja** Presiden dengan Menteri KIB II, Gubernur dan Ketua DPRD Provinsi se Indonesia, **serta hasil diskusi** yang mendalam dengan para Pakar, Perwakilan Dunia Usaha dan pemangku kepentingan lainnya, pada tanggal **19-21 April 2010 di Istana Tampak Siring, Bali.**

TERIMA KASIH